

**REGIONAL DEVELOPMENT STUDY: RESPONSE TO POLICY FOR THE
FORMATION OF A NEW AUTONOMOUS REGION IN CENTRAL
KALIMANTAN**

**KAJIAN PENGEMBANGAN WILAYAH: RESPON KEBIJAKAN
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI KALIMANTAN TENGAH**

Nova Riyanti^{1*}, Evi Satipsi², Muhamad Yusuf³, Rahmat Salam⁴

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia^{1,2,4}

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia⁴

novariyanti@student.umj.ac.id¹

ABSTRACT

The formation of new autonomous regions is an important policy instrument in efforts to expand the reach of government and public services. This research discusses the policy response to the formation of the New Kotawaringin Raya Province in Central Kalimantan. The policy analysis method is used to understand the context, process, and impact of the expansion policy. The results of the analysis show that the formation of the New Greater Kotawaringin Province is the government's effort to bring public services closer to the community, increase the effectiveness and efficiency of government administration, and optimize the use of local resources. However, the response to this policy also faces challenges such as resource management, infrastructure development, and harmonization of interests between regions. The resulting policy implications emphasize the need for synergy between the central and regional governments in managing the positive and negative impacts of the expansion of the new province to achieve sustainable and inclusive development in Central Kalimantan.

Keywords: Policy, Regional Autonomi, Ecpansion

ABSTRAK

Pembentukan daerah otonomi baru menjadi salah satu instrumen kebijakan yang penting dalam upaya memperluas jangkauan pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini membahas respon kebijakan terhadap pembentukan Provinsi Baru Kotawaringin Raya di Kalimantan Tengah. Metode analisis kebijakan digunakan untuk memahami konteks, proses, dan dampak dari kebijakan pemekaran tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Baru Kotawaringin Raya merupakan upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Namun, respon terhadap kebijakan ini juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan harmonisasi kepentingan antarwilayah. Implikasi kebijakan yang dihasilkan menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dampak positif dan negatif dari pemekaran provinsi baru tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Tengah.

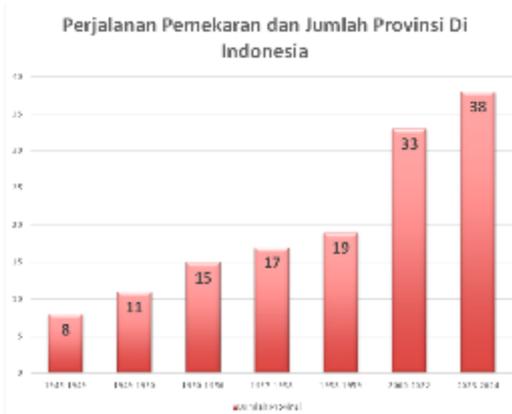
Kata kunci: Kebijakan, Otonomi Daerah, Pemekaran.

PENDAHULUANP

Pemekaran wilayah bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Sejak awal berdirinya, Indonesia sudah memiliki perjalanan sejarah pemekaran. Dari awalnya kemerdekaan Indonesia memiliki 8 Provinsi, di akhir tahun 2023 kembang pemekaran 4 provinsi baru sehingga kini menjadi 38 Provinsi yang terdiri dari 516 Kabupaten/Kota.

Sejak Indonesia berdiri, Wilayah Kalimantan juga berkali-kali sudah

melakukan pemekaran provinsi, diawali dengan Provinsi Kalimantan dengan Ibu Kota Banjarmasin di Tahun 1945, Sekarang sudah berdadat 5 Provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara yang baru menyusul di tahun 2012 dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.



Sumber : diolah peneliti, Mei 2024

Stimulus pemekaran wilayah Kalimantan Utara pertimbangan kepentingan masyarakat setempat yaitu Masyarakat Kalimantan Utara merasa tertinggal jauh baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kemasyarakatan dari daerah lain. Dengan semangat untuk memajukan kualitas hidup masyarakat daerah, mulai timbul wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2000. Namun pemekaran tidak akan terjadi jika tidak melibatkan proses politik dan administratif yang kompleks. Tentunya, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, proses ini juga dapat melibatkan berbagai tantangan dan kompleksitas.

Wacana Pemekaran dua sampai tiga Provinsi Baru Di Kalimantan Tengah makin menggemakan setelah ada penetapan 4 provinsi baru Papua. Urgensi Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah saat ini didesak dengan pertimbangan luas wilayah yang 1,5 kali pulau Jawa dan terluas kedua setelah Papua. Tentu tuntutan akan pemekaran wilayah menjadi isu yang selalu bergulir setiap tahunnya akibat dari ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik. Ketimpangan pembangunan wilayah menjadi isu yang sangat strategis karena memunculkan kluster wilayah maju dan wilayah terbelakang yang terjadi di Kalimantan

Tengah. Ketimpangan yang terjadi tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan antara lain dari perbedaan kekayaan sumber daya, aksesibilitas, kondisi demografis, alokasi investasi, dan prioritas kebijakan yang dilakukan.

Disisi lain, ada perspektif (Wasistiono et al., 2012) Parameter pembentukan daerah otonom berdasarkan desain tiga dimensi yang ditetapkan dalam Desartada terdiri dari (a) dimensi geografi, (b) dimensi demografi, dan (c) dimensi kesisteman (yang mencakup sistem pertahanan keamanan, sistem sosial politik, sistem ekonomi dan keuangan, sistem administrasi publik serta sistem manajemen pemerintahan) dinilai masih bersifat makro, maka untuk kejelasannya masih perlu dijabarkan ke dalam berbagai indikator yang terukur. Dari perspektif yang berbeda, kajian kebijakan (Maulana, 2019) Pembentukan Daerah Otonomi Baru membutuhkan persiapan dan biaya yang cukup besar, mulai dari pembentukan awal hingga penyelenggaraannya. Selain itu, secara umum Daerah Otonomi Baru juga menunjukkan dependensi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah lama. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembentukan DOB tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara (APBN) akibat besarnya jumlah dana yang harus ditransfer kepada daerah-daerah baru.

Desakan untuk membentuk daerah otonom baru terus berlangsung bahkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Walaupun pemekaran itu boleh tapi tentu perlu ada kajian-kajian melalui data kemampuan dan dukungan kewilayahan, kependudukan demografi, ekonomi, sosial dan lainnya termasuk dukungan politik wilayah pemekaran. Pemekaran bisa menjadi pemecahan masalah ketimpangan, bisa pula tidak

memecahkan masalah ketimpangan Pembangunan yang ada. Misalnya pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2002 pasca kerusuhan antar etnis, ternyata 20 tahun berlalu Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan telah berotonomi yang berdaulat tapi isu ketimpangan pembangun masih tetap ada. Didukung dengan hasil penelitian (Sanjaya et al., 2019) yang berjudul *Kemajuan atau Kemunduran? (Kajian Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemekarannya di Provinsi Kalimantan Tengah)*. Ditengah perkembangan ketimpangan di wilayah hasil pemekaran, beberapa tahun terakhir upaya menyuarkan pemekaran provinsi baru Kotawaringin Raya malah semakin keras.

Proyeksi kedepan ada berbagai kegiatan pembangunan yang kemungkinan memarjinalkan Masyarakat Adat Kalimantan Tengah, hasil kajian dari (Widen, 2023) Realisasi wacana sudah didepan mata, pemekaran provinsi baru cenderung berdimensi politis, sehingga akan membahayakan bagi eksistensi Masyarakat Adat Kalimantan Tengah. Problematika inilah yang menjadi keterarikan peneliti untuk mengalisis problematika persiapan dan dampak kebijakan pemekaran Provinsi Baru Kotawaringin Raya di Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi kesiapan pemekaran Provinsi Kotawaringin menjadi Daerah Otonomi Baru. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks dan kompleksitas proses pemekaran tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya wilayah administrasi Provinsi Kotawaringin yang berpotensi untuk menjadi Daerah Otonomi Baru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dewan pakar pemekaran, tokoh adat, serta subjek dan informan penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang persiapan pembentukan daerah otonomi baru. Observasi dilakukan untuk memantau persiapan pembentukan daerah pemekaran provinsi baru hingga deklarasi, dengan mencatat kronologi peristiwa dan pengamatan lapangan. Pengumpulan dokumentasi melibatkan data berupa angka, grafik, dan gambar serta arsip-arsip yang mendukung penelitian tentang persiapan pembentukan daerah otonomi baru di Kalimantan Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Studi tentang respon kebijakan terhadap pembentukan Provinsi Baru Kotawaringin Raya di Kalimantan Tengah telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan implikasi dari kebijakan pemekaran tersebut.

Respon Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pemekaran Kotawaringin Raya bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk prioritas pembangunan, aspirasi politik, dan dinamika sosial ekonomi di wilayah tersebut. Namun, terdapat beberapa respons yang dapat diidentifikasi:

1. Dukungan Penuh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikepemimpinan berslogan Berkah memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran Kotawaringin

- Raya. Respon ini disebabkan oleh keyakinan bahwa pemekaran akan meningkatkan efisiensi administrasi, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan memfasilitasi pembangunan di wilayah tersebut khususnya daerah asalnya yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat dan sekitarnya.
2. **Pendukung Bersyarat:** Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan dukungan terhadap pemekaran, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, mereka mungkin meminta jaminan bahwa pemekaran akan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa tantangan seperti pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur dapat diatasi dengan efektif.
 3. **Penolakan atau Ketidakpastian:** Ada juga kemungkinan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menolak atau mengungkapkan ketidakpastian terhadap pemekaran Kotawaringin Raya. Hal ini bisa disebabkan oleh kekhawatiran akan dampak negatif, seperti potensi perpecahan sosial atau ekonomi, serta tantangan dalam mengelola wilayah yang lebih luas dan kompleks.

Respon kebijakan terhadap pembentukan Provinsi Baru Kotawaringin Raya di Kalimantan Tengah tak terlepas dari dinamika dan implikasi dari kebijakan pemekaran tersebut. Analisis mendalam ini menyoroti beberapa aspek kunci yang layak dipertimbangkan:

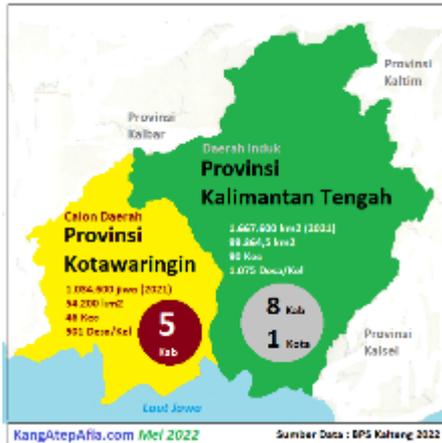
Pertama, motivasi pemerintah dalam membentuk provinsi baru ini tampak kuat, dengan fokus utama pada meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih optimal. Namun,

dalam konteks implementasi kebijakan, perlu diakui bahwa proses pemekaran provinsi baru tidaklah tanpa tantangan. Pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan keseimbangan kepentingan antarwilayah menjadi beberapa isu krusial yang harus diatasi.

Kedua, kesiapan Provinsi Kotawaringin untuk menjadi Daerah Otonomi Baru muncul berbagai perspektif, keyakinan, dan pengalaman yang mempengaruhi proses pemekaran. Hal ini memberikan gambaran yang lebih holistik dan terperinci tentang kompleksitas dan konteks yang terlibat dalam proses tersebut.

Ketiga, bahwa keberhasilan pembentukan Daerah Otonomi Baru tidak hanya tergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan sinergi yang kuat untuk mengelola dampak positif dan negatif dari pemekaran provinsi baru guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Tengah.

Sehingga penting banyaknya kajian akademis secara menyeluruh terhadap kebijakan pemekaran provinsi baru serta perlunya keterlibatan aktif dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan sinergis, pembentukan Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Tengah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memperkuat tatanan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Peta Ilustrasi Pemekaran Daerah

Sumber : KagatepAfia.com, Mei 2022

Gambar 1 menggambarkan bahwa Calon Daerah Provinsi Baru Pemekaran Kotawaringin Raya akan mencakup 5 Kabupaten dan terdiri 54.200km² dengan 46 Kecamatan dan 501 Desa / Kelurahan. sedangkan luas wilayah keseluruhan daerah induk adalah 153.564,50 km².

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber: dataset.kaltengsatudata.2023.

Nama Kabupaten	Tahun	Jenis_Kelamin	Nilai / Jumlah
Kab. Kotawaringin Barat	2022	Laki-Laki	144.135
Kab. Kotawaringin Barat	2022	Perempuan	136.255
Kab. Kotawaringin Timur	2022	Laki-Laki	222.184
Kab. Kotawaringin Timur	2022	Perempuan	207.519
Kab. Seruyan	2022	Laki-Laki	79.168
Kab. Seruyan	2022	Perempuan	72.724
Kab. Sukamara	2022	Laki-Laki	32.753
Kab. Sukamara	2022	Perempuan	29.959
Kab. Lamandau	2022	Laki-Laki	56.741
Kab. Lamandau	2022	Perempuan	50.350
Total Penduduk Daerah Wilayah Persiapan			1.031.788

Sumber : dioleh peneliti dari datasetkaltengsatudata. 2024.

Sehingga, Daerah induk masih menyisakan wilayah seluas 99.364,5 km² atau sekitar 64,71 persen, dengan jumlah penduduk (data tahun 2021 yang bersumber dari BPS Kalteng, 2022) sebanyak 1.667.600 jiwa atau sekitar

61,71 persen). Daerah induk Provinsi Kalteng akan meliputi delapan kabupaten dan satu kota.

Kesiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Tengah, khususnya pemekaran Provinsi Baru Kotawaringin Raya, sangat perlu memperhatikan beberapa aspek kunci:

1. Kesiapan Administratif

Kesiapan administratif mencakup kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah baru, termasuk pembentukan struktur pemerintahan, penyusunan regulasi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang memadai.

2. Kesiapan Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah baru. Ini meliputi aksesibilitas transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana komunikasi yang memadai.

3. Kesiapan Sosial dan Ekonomi

Kesiapan sosial dan ekonomi melibatkan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil, serta keberlanjutan ekonomi yang memadai untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah baru.

4. Kesiapan Politik

Kesiapan politik mencakup dukungan politik dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah yang terdampak, dan masyarakat setempat. Kerjasama politik yang baik akan memfasilitasi proses pemekaran dan implementasi kebijakan yang efektif.

5. Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat di wilayah baru juga sangat penting. Ini mencakup pemahaman tentang konsekuensi dan manfaat dari pemekaran provinsi baru, serta kesiapan untuk beradaptasi

dengan perubahan yang mungkin terjadi.

Analisis Respon pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Tengah, Juga menganalisis keputusan mengenai prioritas daerah juga menjadi bahan untuk kebijakan apakah lebih baik di Kotawaringin Raya atau Barito Raya memerlukan analisis mendalam berdasarkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat digunakan:

1. Potensi Ekonomi.

Kotawaringin Timur memiliki Potensi ekonomi di wilayah ini bisa lebih kuat karena terdapat sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang sudah berkembang. Wilayah ini juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat industri dan perdagangan. Sedangkan Barito Raya merupakan wilayah ini mungkin lebih bergantung pada sektor pertambangan dan sumber daya alam. Namun, potensi ini juga dapat memberikan pendapatan yang signifikan jika dikelola dengan baik.

2. Kondisi Infrastruktur

Kotawaringin Raya telah memiliki Infrastruktur yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih tinggi dapat mendukung percepatan pembangunan di wilayah ini. Jalur transportasi darat, laut, dan udara yang relatif baik juga menjadi pertimbangan penting. Sedangkan Barito Raya Infrastruktur mungkin lebih terbatas, sehingga diperlukan investasi yang lebih besar untuk membangun aksesibilitas dan fasilitas dasar. Ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk pembangunan jangka panjang.

3. Kependudukan dan Sosial Budaya

Kotawaringin Raya memiliki Populasi yang lebih besar dan lebih heterogen bisa menjadi keuntungan dalam hal daya dukung ekonomi dan pembangunan. Namun, pengelolaan

keragaman sosial budaya perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik serta meninggalkan budaya lokal yang ada. Sedangkan Barito Raya meskipun populasi mungkin lebih kecil, adanya komunitas adat yang kuat dan identitas budaya yang khas bisa menjadi kekuatan dalam membentuk karakter daerah otonomi baru yang unik.

4. Stabilitas Politik dan Keamanan

Kotawaringin Raya mempunyai Stabilitas politik cenderung lebih baik jika terdapat dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, persaingan politik bisa lebih ketat karena kepentingan ekonomi yang lebih besar. Berbeda dengan Barito Raya yang memiliki wilayah ini mungkin lebih stabil secara politik jika memiliki kesatuan sosial yang kuat, tetapi perlu diperhatikan potensi konflik terkait eksploitasi sumber daya alam.

Dari beberapa pertimbangan tersebut, perlu perimbangan dari Dukungan dari Pemerintah Pusat. Mengingat dukungan pemerintah pusat akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan nasional juga penting. Pemerintah mungkin lebih cenderung mendukung wilayah yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, juga pertimbangan Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Nasional. Pertimbangan pemilihan Kotawaringin Raya Jika wilayah ini lebih sejalan dengan rencana strategis nasional atau provinsi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, maka prioritas bisa lebih diarahkan ke sini. Dan kecenderungan Barito Raya, Jika Barito Raya memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan di kawasan

yang kurang berkembang, maka prioritas bisa diberikan ke wilayah ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, prioritas antara Kotawaringin Raya dan Barito Raya harus disesuaikan dengan tujuan strategis pemerintah daerah dan pusat, serta potensi jangka panjang dari masing-masing wilayah. Jika tujuan utama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang sudah relatif mapan, Kotawaringin Raya mungkin menjadi prioritas. Namun, jika tujuan adalah pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang lebih membutuhkan perhatian, Barito Raya bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan langkah kebijakan yang strategis dalam upaya memperluas cakupan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Studi ini mengkaji respon kebijakan terhadap pembentukan Provinsi Baru Kotawaringin Raya di Kalimantan Tengah. Melalui analisis kebijakan, ditemukan beberapa temuan penting:

1. Pemerintah memiliki motivasi kuat untuk membentuk Provinsi Baru Kotawaringin Raya guna mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Meskipun memiliki potensi untuk memberikan manfaat signifikan, proses pemekaran provinsi baru dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan harmonisasi kepentingan antarwilayah.

3. Kesiapan pemekaran Provinsi Kotawaringin untuk menjadi Daerah Otonomi Baru, dengan mengeksplorasi berbagai perspektif, keyakinan, dan pengalaman yang mempengaruhi proses tersebut. Sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dampak positif dan negatif dari pemekaran provinsi baru, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Tengah.

4. Prioritas antara Kotawaringin Raya dan Barito Raya harus disesuaikan dengan tujuan strategis pemerintah daerah dan pusat, serta potensi jangka panjang dari masing-masing wilayah.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru serta perlunya kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasinya demi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- AN, M. N., & Munasto, D. (2024). Urgensi Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 580-586.
- Asfia, H. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Asfia, H. (2023). Urgensitas Pemekaran Daerah Di Kalimantan Tengah- Jejak Pustaka (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Cakranegara, J. J. S. (2020). Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (1999-2012). *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 4(1), 39-60.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Kusuma, W., & Sintasari, S. A. (2023). Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(1), 64-73.
- Masdhugi, M. (2022). *Analisis Kesiapan Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Untuk Mewujudkan Daerah Otonom Baru* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Maulana, A. (2019). *Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara*. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 53–67.
- Nugroho, A., Jumanah, J., & Haetami, H. (2023). Analisis Cost And Benefit Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Di Indonesia. *The Indonesian Journal Of Public Administration (IJPA)*, 9(1).
- Sanjaya, L. R., Soetarto, E., & Pravitasari, A. E. (2019). Ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (kajian pada kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya). *Jurnal TATALOKA*, 21(2), 254–266.
- Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia. *Jurnal Government Of Archipelago-Igoa*, 1(1), 34-44.
- Tahir, R., Anggraeni, A. F., Thamrin, S., Yulianti, M. L., Lestari, W., Wahidah, A. N., ... & Patria, T. M. (2023). *Metodologi Penelitian: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wasistiono, S., Sumarsono, S., Djojosoekarto, A., & Suryaman, C. (2012). *Parameter Daerah Persiapan: Penjelasan Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Desain Besar Penataan Daerah*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Widen, K. (2023). Orang Dayak dan Kebudayaannya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 12(2), 207–218.
- Winaryo, S. (2019). Penyelesaian Tata Batas Daerah Otonom Baru (DOB) Di Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(2), 1-18.
- Zulfauzan, R., Nugroho, K., & Budi, D. W. (2019). Politik Etnisitas Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Kotawaringin. *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)*, 12(2), 196-208.